

Kritik terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka: Kompetitif dan Administratif dalam Perspektif Paulo Freire

Muhamad Syukron Hidayat¹

¹Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada

Submit

20 November 2025

Review

26 November 2025

Publish

2 Desember 2025

Abstrak

Implementasi Kurikulum Merdeka menghadapi tantangan terkait asesmen, beban administratif guru, dan fleksibilitas pedagogis, yang berpotensi menghambat tujuan pembelajaran humanis dan dialogis. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan implementasi Kurikulum Merdeka lalu dianalisis melalui perspektif pedagogi kritis Paulo Freire. Penelitian menggunakan metode kajian literatur dengan menganalisis berbagai temuan empiris terbaru terkait asesmen, beban administratif guru, pelaksanaan P5, dan kesiapan guru dalam pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi empat persoalan utama, yaitu ketidakseimbangan asesmen yang memperkuat pola *banking education*, dehumanisasi guru akibat beban administratif tinggi, reduksi P5 menjadi aktivitas dokumentatif, serta kesenjangan antara idealisme kurikulum dan kesiapan praktis guru. Simpulan penelitian menegaskan bahwa kesenjangan tersebut bersifat struktural dan memerlukan dukungan pelatihan, penyederhanaan administrasi, serta penguatan budaya dialogis agar Kurikulum Merdeka dapat berjalan sesuai tujuan humanis dan transformasional.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, Pedagogi Kritis, Freire

Abstract

The implementation of the Kurikulum Merdeka faces challenges related to assessment, teachers' administrative workload, and pedagogical flexibility, which may hinder the achievement of humanistic and dialogical learning objectives. This study aims to identify key challenges in the implementation of the Merdeka Curriculum and examine them through Paulo Freire's critical pedagogy. Using a literature review method, the study analyzes recent empirical findings related to assessment practices, teachers' administrative workload, the implementation of the Pancasila Student Profile Project (P5), and teacher readiness. The results show four major issues: unbalanced assessment practices reinforcing banking education, the dehumanization of teachers through excessive administrative demands, the procedural reduction of P5, and the gap between curricular ideals and teachers' practical capacity. The study concludes that these challenges are structural and require comprehensive support, including training, administrative simplification, and the strengthening of dialogic and reflective pedagogical practices to ensure that the Merdeka Curriculum aligns with its humanistic and transformative goals.

Keywords: Merdeka Curriculum, Critical Pedagogy, Freire

PENDAHULUAN

Implementasi Kurikulum Merdeka dalam pendidikan Indonesia diklaim memberi keleluasaan bagi sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran sesuai kebutuhan siswa (Anisa et al., 2025). Dokumen resmi Kemendikbud menyebutkan bahwa Kurikulum Merdeka memberi ruang fleksibilitas dalam penyusunan modul ajar, pelaksanaan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta diferensiasi pembelajaran (Dinn et al., 2024). Secara ideal, kurikulum ini dimaksudkan untuk mengurangi beban akademik yang kaku dan mendorong pembelajaran yang lebih kontekstual, partisipatif, serta berpusat pada perkembangan individu peserta didik.

Realitas implementasi di lapangan menunjukkan tantangan yang tidak kecil. Laporan (KSPSTK, 2025) mencatat adanya kesenjangan pemahaman guru dan keterbatasan sumber daya, yang berdampak pada pelaksanaan pembelajaran. Di samping itu, asesmen pembelajaran masih

banyak didominasi oleh asesmen akhir (sumatif), sementara asesmen awal (diagnostik) dan asesmen proses (formatif) belum terintegrasi secara utuh dalam kegiatan belajar-mengajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Dianti et al. (2025), asesmen dalam pembelajaran idealnya mencakup tiga bentuk utama, yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam mendukung efektivitas pembelajaran. Dominasi asesmen sumatif dalam praktik pembelajaran membuat proses pendidikan akan lebih berorientasi pada hasil akhir daripada proses. Kondisi ini berpotensi memperkuat budaya kompetitif di sekolah, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Kurikulum Merdeka benar-benar mewujudkan pembelajaran yang membebaskan.

Sejalan dengan persoalan ketidakseimbangan asesmen tersebut, guru juga menghadapi tantangan lain yang bersifat struktural, yaitu meningkatnya tuntutan administratif dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Berbagai dokumen pembelajaran, pelaporan asesmen, dan kebutuhan dokumentasi kelas menambah beban kerja guru sehingga ruang untuk membangun pembelajaran yang dialogis dan kontekstual menjadi semakin terbatas (Rosyada et al., 2024). Pertanyaannya kemudian, apakah kompleksitas tugas administratif dalam Kurikulum Merdeka benar-benar mendukung tujuan pendidikan yang membebaskan, atau justru menghadirkan hambatan baru bagi guru dalam menciptakan proses belajar yang bermakna?

Dalam konteks persoalan tersebut, gagasan Paulo Freire tentang pendidikan yang membebaskan menawarkan kerangka kritis untuk menilai praktik pendidikan dalam Kurikulum Merdeka. Freire mengkritik model “pendidikan gaya bank”, yakni ketika proses belajar diarahkan pada kepatuhan, pengisian informasi, dan penilaian sepihak, sehingga menempatkan peserta didik maupun guru dalam posisi pasif terhadap struktur pendidikan. Dalam kerangka ini, asesmen yang tidak seimbang dan praktik administratif yang menumpuk dapat berfungsi sebagai instrumen reproduksi relasi kuasa, karena keduanya mendorong pendidikan yang berorientasi pada penyeragaman dan pelaporan alih-alih dialog dan refleksi. Sebagai gantinya, Freire menekankan pendidikan “hadap-masalah” yang menuntut dialog, kesadaran kritis, serta peran aktif guru dan peserta didik dalam memaknai proses belajar (Situmorang, 2021). Pendekatan ini menuntut agar struktur kurikulum, asesmen, dan mekanisme administratif mendukung pemanusiaan pendidikan, bukan memperkuat praktik yang bersifat mekanis dan hierarkis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama. Pertama, ketidakseimbangan praktik asesmen dalam Kurikulum Merdeka, khususnya dominasi asesmen sumatif, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Kurikulum Merdeka mencerminkan praktik pembelajaran yang membebaskan atau justru memperkuat budaya kompetitif di sekolah. Kedua, meningkatnya tuntutan administratif bagi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka diduga membatasi ruang dialogis dan reflektif yang seharusnya menjadi bagian dari proses pembelajaran yang humanis.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketidakseimbangan asesmen dalam Kurikulum Merdeka dipahami melalui perspektif pendidikan membebaskan Paulo Freire, termasuk implikasinya terhadap orientasi belajar di sekolah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana beban administratif yang dihadapi guru membatasi ruang dialogis, reflektif, dan humanis dalam proses pembelajaran. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran kritis mengenai sejauh mana struktur kurikulum dan praktik implementasinya mendukung atau justru menghambat tercapainya pendidikan yang membebaskan.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena studi pustaka memungkinkan peneliti memahami fenomena pendidikan secara holistik dan kontekstual tanpa bergantung pada data numerik (Fadli, 2021). Selain itu, penelitian kepustakaan penting untuk menelaah hubungan antara teori, kebijakan, dan praktik pendidikan melalui sumber primer dan sekunder (Annasthasya et al., 2025). Penelitian dilaksanakan selama bulan Oktober-November 2025 dengan menelaah dan menganalisis berbagai dokumen, buku, laporan resmi, serta artikel ilmiah terkait Kurikulum Merdeka dan pedagogi kritis.

Subjek penelitian ini adalah teks-teks tertulis yang memuat gagasan Paulo Freire serta dokumen-dokumen Kurikulum Merdeka. Sumber primer berupa buku “Pendidikan Kaum

Tertindas” karya Paulo Freire yang digunakan untuk menelaah konsep pendidikan gaya bank, pembebasan, dialogis, dan relasi kuasa dalam pendidikan. Sumber sekunder yang dikaji meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga pemerintah, regulasi kurikulum, karya akademik tentang asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, serta penelitian mengenai budaya kompetitif dan beban administratif guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelusuri, memilih, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Dokumen dikumpulkan berdasarkan topik-topik inti seperti pedagogi kritis, asesmen kurikulum, budaya kompetitif, dan beban kerja guru. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar pencatatan dan pengkodean literatur yang membantu peneliti mengorganisasi data serta mengidentifikasi kesesuaian antara konsep Freire dan temuan penelitian terdahulu.

Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Sebagaimana dijelaskan Glenn Bowen (2025) bahwa analisis dokumen memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam melalui penelaahan sistematis terhadap teks yang relevan. Dalam penelitian ini, proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama seperti budaya kompetitif, beban administratif guru, dan pembelajaran membebaskan, kemudian mengaitkannya dengan konsep pendidikan kritis Freire. Metode ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana implementasi Kurikulum Merdeka selaras dengan prinsip pendidikan yang membebaskan atau justru mempertahankan pola kompetitif dan beban administratif yang menekan.

HASIL

Bagian ini menyajikan temuan utama penelitian berbasis analisis dokumen dan kajian literatur tentang implementasi Kurikulum Merdeka. Melalui proses reduksi data, kategorisasi, dan penarikan tema dari berbagai sumber nasional maupun internasional, analisis menemukan empat isu konsisten dalam implementasinya: ketidakseimbangan asesmen, tingginya beban administratif guru, kecenderungan administratif dalam pelaksanaan P5, serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran dan kesiapan guru.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Temuan

No	Tema	Temuan Utama	Sumber Referensi
1	Ketidakseimbangan Sistem Asesmen dalam Implementasi Kurikulum Merdeka	Asesmen diagnostik, formatif, sumatif belum terintegrasi seimbang, asesmen sumatif lebih dominan. Persoalan terletak pada implementasi, bukan pada desain kurikulum.	(KSPSTK, 2025); (Serani & Hairida, 2024); (Aminah & Mustamid, 2024); (Maut, 2022).
2	Beban Administratif Guru dalam Pembelajaran dan Perangkat Ajar	Guru dengan beban administratif tinggi (modul ajar, ATP, asesmen autentik, portofolio). Minim pelatihan menyebabkan waktu pengerjaan dokumen semakin panjang. Tingkat kompleksitas tugas administratif menimbulkan kelelahan emosional dan menurunkan keterlibatan pedagogis guru.	(Lubis et al., 2025); (Handayani et al., 2025); (Rosyada et al., 2024); (Berutu et al., 2023); (Longmuir & McKay, 2024); (Shen et al., 2025).
3	Praktik Pelaksanaan P5 yang Cenderung Administratif	P5 direduksi menjadi kegiatan dokumentatif untuk memenuhi laporan; nilai transformatifnya hilang. Fokus sekolah lebih pada produk akhir dan kelengkapan dokumen daripada proses reflektif dan dialogis yang seharusnya menjadi inti P5.	(S. T. Situmorang et al., 2025); (Sobon & Astari, 2024).

4	Dampak Struktur Kurikulum terhadap Kualitas Pembelajaran dan Kesiapan Guru	Terdapat kesenjangan ideal dengan realitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Kesiapan guru rendah, fasilitas terbatas, dan pelatihan tidak merata menghambat fleksibilitas KM. Pembelajaran berbasis proyek belum efektif karena kendala teknis, partisipasi siswa rendah, dan waktu tidak memadai.	(Dinn et al., 2024) (KSPSTK, 2025); (Yusa et al., 2023); (Hasballah & Zulfatmi, 2024); (Maylita, 2023); (Kuntuamas et al., 2025); (Kautsar et al., 2025); (Febrianningsih & Ramadan, 2023); (Wati & Sugesti, 2025).
---	--	--	---

Ketidakseimbangan Sistem Asesmen dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi asesmen dalam Kurikulum Merdeka belum mencapai keseimbangan antara asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Laporan KSPSTK (2025) Kemdikbudristek menegaskan bahwa banyak satuan pendidikan masih menghadapi kendala dalam menjalankan asesmen proses karena keterbatasan pemahaman guru, instrumen penilaian, serta dukungan teknis. Temuan ini sejalan dengan penelitian di sekolah dasar di Kota Sintang, yang memperlihatkan bahwa guru mengalami kesulitan merancang instrumen asesmen, memanfaatkan teknologi penilaian, dan menyesuaikan asesmen dengan keragaman kemampuan siswa, sehingga asesmen tidak berjalan berkesinambungan (Serani & Hairida, 2024).

Hambatan serupa juga muncul di SD N Ngasinan, di mana asesmen formatif belum mencakup penilaian diri dan sejawat, serta pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan instruksional masih terbatas (Aminah & Mustamid, 2024). Selain itu pada asesmen awal, penelitian di SD Negeri 1 Tongkuno menunjukkan bahwa hanya 45,45 persen guru yang pernah melaksanakan asesmen diagnostik dan sebagian besar belum memperoleh pelatihan, menandakan bahwa proses pemetaan kebutuhan belajar belum menjadi praktik yang mapan (Maut, 2022).

Pada konteks yang lebih luas, ketidakseimbangan asesmen bukan disebabkan karena desain asesmen Kurikulum Merdeka, akan tetapi dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas pedagogis guru, tekanan administratif, dan minimnya dukungan sumber daya. Laporan KSPSTK (2025) menunjukkan bahwa asesmen proses sulit terlaksana secara optimal karena guru lebih banyak terbebani tugas pelaporan dan penyusunan dokumen, sehingga asesmen non-sumatif tidak berjalan konsisten. Akibatnya, asesmen sumatif masih menjadi bentuk evaluasi yang dominan di banyak satuan pendidikan, sementara asesmen diagnostik dan formatif belum berfungsi sebagai dasar pembelajaran berkelanjutan.

Beban Administratif Guru dalam Pembelajaran dan Perangkat Ajar

Temuan kedua menunjukkan bahwa guru menghadapi beban administratif yang signifikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Lubis et al. (2025) mengungkap bahwa penerapan asesmen autentik memerlukan pelaporan naratif terperinci dan pengelolaan portofolio peserta didik secara intensif. Handayani et al. (2025) menambahkan bahwa kurangnya pelatihan menyebabkan guru membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun dokumen asesmen. Selain itu, Rosyada et al. (2024) dan Berutu et al. (2023) menemukan bahwa penyusunan modul ajar, ATP, dan dokumen pendukung lainnya memperberat beban kerja guru secara administratif.

Temuan internasional turut menguatkan pola ini. Longmuir & McKay (2024) menjelaskan bahwa beban kerja guru tidak hanya dipengaruhi oleh kuantitas tugas, tetapi juga oleh kompleksitas atau "density" tugas administratif. Sementara itu, Shen et al. (2025) menemukan bahwa beban administratif yang tinggi berkontribusi terhadap kelelahan emosional dan penurunan keterlibatan guru dalam proses pedagogis. Dengan demikian, beban administratif guru dalam Kurikulum Merdeka merupakan persoalan struktural yang berdampak langsung pada efektivitas pengajaran.

Praktik Pelaksanaan P5 yang Cenderung Administratif

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di berbagai sekolah masih cenderung bersifat administratif. Situmorang et al. (2025) mencatat bahwa P5 kerap direduksi menjadi rangkaian aktivitas dokumentatif untuk memenuhi tuntutan laporan, sehingga nilai transformatif yang seharusnya melekat pada proyek ini menjadi berkurang. Temuan ini sejalan dengan Sobon & Astari (2024) yang menegaskan bahwa secara ideal P5 perlu menjadi ruang pembelajaran berbasis problem-posing yang membuka kesempatan bagi siswa untuk berdialog, berkolaborasi, dan berpartisipasi secara kritis dalam menyelesaikan persoalan kontekstual. Namun, orientasi administratif yang dominan di lapangan membuat fokus kegiatan beralih pada pencapaian produk akhir serta kelengkapan dokumen dibandingkan pendalaman proses reflektif, sehingga P5 berisiko kehilangan perannya sebagai sarana penguatan karakter dan pembentukan cara berpikir kritis yang menjadi inti dari rancangan kurikulum.

Dampak Struktur Kurikulum terhadap Kualitas Pembelajaran dan Kesiapan Guru

Struktur Kurikulum Merdeka yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas pedagogis melalui modul ajar, diferensiasi pembelajaran, dan proyek P5 (Dinn et al., 2024) belum sepenuhnya terlaksana akibat berbagai hambatan implementatif. Laporan KSPSTK (2025) menegaskan adanya kesenjangan pemahaman guru dan keterbatasan sumber daya yang menghambat proses pembelajaran. Berbagai penelitian juga menunjukkan adanya jarak antara idealisme kurikulum dan praktik di sekolah. Yusa et al. (2023) menyoroti keterbatasan infrastruktur, pelatihan guru, dan ketimpangan sarana yang membuat fleksibilitas pembelajaran sulit diwujudkan. Hasballah & Zulfatmi (2024) mencatat bahwa guru kesulitan menerapkan model diferensiasi dan proyek P5 karena minimnya pelatihan, beban administratif, dan fasilitas pendukung yang terbatas. Maylita (2023) menekankan bahwa kesiapan guru menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi, namun banyak sekolah, terutama yang bersumber daya rendah, masih menghadapi kendala teknis dan infrastruktur.

Kuntuamas et al. (2025) menemukan banyak guru masih mengalami kesulitan memahami perangkat ajar Kurikulum Merdeka, mulai dari modul ajar, alur tujuan pembelajaran, hingga asesmen autentik, sehingga guru kebingungan saat merancang pembelajaran berbasis diferensiasi dan proyek P5. Kautsar et al. (2025) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek belum optimal dalam mengembangkan kemampuan berpikir analitis siswa akibat keterbatasan waktu, partisipasi siswa yang pasif, dan ketidaksempurnaan kesiapan guru. Febrianningsih & Ramadan (2023) menegaskan bahwa kesiapan guru sangat dipengaruhi pelatihan, sumber daya, dan manajemen sekolah, sehingga dukungan struktural menjadi faktor penting. Temuan Wati & Sugesti (2025) juga menunjukkan bahwa penerapan Project-Based Learning (PjBL) masih terkendala kemampuan metodologis guru dan keterbatasan fasilitas, sehingga fleksibilitas pedagogis Kurikulum Merdeka menuntut kesiapan sistemik, bukan hanya kesiapan individu. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menegaskan bahwa visi progresif Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya terwujud karena hambatan struktural, keterbatasan sarana, dan ketidaksiapan guru dalam praktik pembelajaran.

PEMBAHASAN

Ketidakseimbangan Asesmen Menjadi Instrumen “Banking Education”

Temuan penelitian menunjukkan bahwa asesmen dalam Kurikulum Merdeka masih didominasi oleh asesmen sumatif, sementara asesmen diagnostik dan formatif belum diterapkan secara optimal (KSPSTK, 2025). Ketiga bentuk asesmen tersebut seharusnya berfungsi saling melengkapi dalam memahami perkembangan belajar peserta didik (Dianti et al., 2025).

Dominasi asesmen sumatif ini memperkuat budaya kompetitif yang berorientasi pada capaian numerik, sebagaimana ditunjukkan oleh Dong & Liu (2022), bahwa sistem evaluasi berisiko tinggi (*high-stakes assessment*) menghasilkan efek *washback* yang membuat siswa dan guru berfokus pada hasil akhir, bukan pembelajaran bermakna. Dalam konteks ini, pembelajaran bermakna merujuk pada proses belajar yang menumbuhkan dialog, keterlibatan aktif, pemahaman konseptual, serta kemampuan mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman dan realitas sosial peserta didik.

Fenomena ini mencerminkan praktik “pendidikan gaya bank” (*banking education*), yaitu proses pendidikan yang menempatkan siswa sebagai objek pasif penerima pengetahuan (Paulo

Freire, 1970/2025). Freire menegaskan bahwa pendidikan yang berfokus pada penilaian hasil akhir dan akumulasi informasi justru melanggengkan pola relasi yang menindas, di mana siswa tidak diberdayakan untuk berpikir kritis maupun berdialog. Studi Ćumura & Petrović (2022) dan Chalaune (2021) juga menunjukkan bahwa sistem asesmen yang tidak memberi ruang refleksi dan partisipasi berpotensi menghambat terbentuknya *critical consciousness* sebagai inti pendidikan pembebasan.

Dengan demikian, ketidakseimbangan sistem asesmen dalam implementasi Kurikulum Merdeka bukan hanya mencerminkan kendala implementatif, tetapi juga persoalan filosofis yang bertentangan dengan semangat pendidikan humanis dan dialogis. Asesmen yang tidak dijalankan secara berimbang membuat pembelajaran tetap berpusat pada hasil, bukan pada proses reflektif, sehingga melemahkan tujuan Kurikulum Merdeka untuk menciptakan pembelajaran yang membebaskan dan kontekstual. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa ketidakseimbangan asesmen dalam penerapan Kurikulum Merdeka ini dapat mereproduksi “pendidikan gaya bank” (*banking education*).

Dehumanisasi Guru dalam Birokrasi Kurikulum

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka memberikan beban administratif tinggi pada guru, mulai dari penyusunan modul ajar, ATP, hingga pelaporan asesmen autentik (Handayani et al., 2025; Lubis et al., 2025). Kondisi ini diperparah dengan minimnya pelatihan, sehingga guru membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun dokumen asesmen dan perangkat ajar. Penelitian Rosyada et al. (2024) dan Berutu et al. (2023) juga memperlihatkan bahwa beban administratif menjadi salah satu kendala utama dalam efektivitas pembelajaran pada Kurikulum Merdeka.

Temuan tersebut konsisten dengan laporan OECD (2025), yang menunjukkan bahwa beban kerja guru di banyak negara bukan hanya ditentukan oleh kuantitas tugas, tetapi juga oleh tingkat kompleksitas atau *density* tugas administratif. Longmuir & McKay (2024) menegaskan bahwa semakin kompleks administrasi yang harus diolah guru, semakin besar kemungkinan guru mengalami tekanan kerja. Sementara itu, Shen et al. (2025) menemukan hubungan signifikan antara beban administratif berlebihan, *emotional exhaustion* (kelelahan emosional) dan menurunnya keterlibatan guru dalam proses pedagogis.

Melalui perspektif pedagogi kritis, beban administratif ini mencerminkan logika manajerial yang menggeser peran guru menjadi agen birokrasi. Johnson et al. (2024) menunjukkan bahwa struktur neoliberal dalam pendidikan mendorong akuntabilitas administratif yang mengurangi ruang pedagogis reflektif. Selain itu Abdillah (2017) memperkuat analisis ini dengan menunjukkan bahwa birokratisasi pendidikan mengarah pada dehumanisasi guru, yang terjebak dalam rutinitas mekanistik.

Berdasarkan perspektif Paulo Freire (1970/2025), meningkatnya beban administratif guru mencerminkan bentuk dehumanisasi struktural, karena menjadikan guru sekadar pelaksana prosedur birokratis alih-alih pendidik reflektif. Ketika waktu dan energi guru habis untuk laporan dan dokumen, ruang untuk dialog, kreativitas pedagogis, dan relasi humanis dengan siswa menjadi tergerus, suatu kondisi yang bertentangan dengan prinsip pendidikan dialogis. Karena itu, beban administratif dalam Kurikulum Merdeka bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga filosofis. Tanpa dukungan struktural dan pengurangan tugas administratif, kurikulum yang ideal dapat berubah menjadi praksis yang opresif dan menghambat fungsi pedagogis guru.

P5 yang Gagal Menjadi Ruang Problem-Posing Education

Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di banyak sekolah mengalami reduksi makna. P5 lebih sering dijalankan sebagai pemenuhan laporan administratif daripada ruang pembelajaran transformatif (Situmorang et al., 2025). Hal ini selaras dengan temuan Sobon & Astari (2024) menegaskan bahwa idealnya P5 merupakan ruang *problem-posing* yang memungkinkan dialog, kolaborasi, dan pemecahan masalah kontekstual. Namun kecenderungan administratif ini menunjukkan adanya gap antara konsep P5 dan praktiknya di lapangan.

Johnson et al. (2024) menyoroti bahwa kebijakan progresif sering kali direduksi menjadi prosedur manajerial ketika institusi lebih fokus pada akuntabilitas administratif. Dalam kerangka Paulo Freire (1970/2025), reduksi P5 menjadi aktivitas administratif bertolak belakang dengan konsep “problem-posing education”, yakni pembelajaran yang menempatkan guru dan siswa

sebagai subjek dialogis dan kritis. Freire menegaskan bahwa pembelajaran harus berorientasi pada pengalaman hidup peserta didik dan mengarahkan mereka pada kesadaran kritis terhadap realitas sosial. Jika P5 hanya dijalankan sebagai proyek yang menekankan produk akhir dan laporan tertulis, maka dimensi humanis, dialogis, dan emansipatorisnya hilang. Temuan ini semakin diperkuat oleh Chalaune (2021), yang menjelaskan bahwa pedagogi kritis hanya dapat berkembang ketika proses pembelajaran memungkinkan siswa untuk terlibat secara reflektif dan dialogis, bukan sekadar menjalankan instruksi prosedural.

Dengan demikian, pelaksanaan P5 yang cenderung administratif bukan hanya masalah pelaksanaan teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya internalisasi nilai pedagogi kritis dalam implementasi kurikulum. P5 pada akhirnya berisiko kehilangan peran strategisnya sebagai wahana pembentukan karakter, cara berpikir kritis, dan kesadaran sosial peserta didik. Dengan kata lain, P5 telah gagal mewujudkan pendidikan dialogis dan kritis, di mana guru dan siswa menjadi subjek aktif dalam pembelajaran, atau dalam konsep Freire disebut “problem-posing education”.

Idealisme Kurikulum dan Realitas Guru

Hal Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat tergantung pada kesiapan guru dan dukungan struktural yang tersedia. Keterbatasan pelatihan, fasilitas, dan manajemen sekolah menciptakan jarak antara desain kurikulum yang ideal dan praktik di lapangan. Dari temuan Lonescu et al. (2022), kesenjangan antara paradigma teoretis dalam dokumen kebijakan dan mentalitas praktis guru; dapat dilihat bukan hanya fenomena lokal, melainkan tantangan global yang sering menghambat implementasi kurikulum progresif. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, hal ini berarti fleksibilitas pedagogis dan inovasi hanya dapat diwujudkan apabila guru memiliki kompetensi yang cukup, dukungan akademik, dan sumber daya yang memadai.

Dalam perspektif Freire (1970/2025), situasi ini mencerminkan kebebasan semu (*illusory autonomy*) yang diberikan kepada guru. Kurikulum yang progresif tidak cukup hanya dirancang secara ideal; guru harus diposisikan sebagai subjek pendidikan yang aktif, memiliki kesadaran kritis, dan diberi ruang reflektif untuk mengimplementasikan metode diferensiasi, proyek P5, dan pembelajaran berbasis proyek. Tanpa dukungan struktural dan penguatan kompetensi, fleksibilitas kurikulum justru berubah menjadi beban tambahan bagi guru, yang mengurangi kapasitas mereka untuk membangun pembelajaran dialogis, kreatif, dan kontekstual.

Selain itu, analisis ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara idealisme kurikulum dan realitas guru bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga filosofis. Beban administratif, keterbatasan fasilitas, dan disparitas pelatihan menghambat kemampuan guru untuk berinovasi, mengurangi ruang pedagogis reflektif, dan menimbulkan risiko dehumanisasi profesi guru, sebagaimana dikritik dalam literatur pendidikan kritis. Dengan kata lain, keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada investasi dalam pelatihan, infrastruktur, dan manajemen sekolah, yang memungkinkan guru untuk benar-benar memanfaatkan fleksibilitas kurikulum secara efektif dan membebaskan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi empat persoalan utama: (1) ketidakseimbangan asesmen, (2) beban administratif guru, (3) pelaksanaan P5 yang cenderung administratif, dan (4) ketidaksiapan guru dalam menerapkan fleksibilitas kurikulum. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme kurikulum dan praktik nyata di sekolah. Dalam perspektif Paulo Freire, kondisi ini mencerminkan praktik pendidikan yang belum sepenuhnya dialogis dan humanis, karena struktur kurikulum dan birokrasi sekolah masih memperkuat budaya kompetitif, relasi yang hierarkis, serta dehumanisasi peran guru. Dengan demikian, implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan perbaikan struktural agar mampu mewujudkan pendidikan yang membebaskan, reflektif, dan kontekstual.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, perbaikan implementasi Kurikulum Merdeka sebaiknya difokuskan pada dua hal utama, yaitu mengurangi praktik budaya kompetitif dan beban

administratif berlebihan pada guru. Budaya kompetitif yang berlebihan dalam implementasi Kurikulum Merdeka perlu dikurangi. Penelitian ini menemukan bahwa budaya tersebut terutama muncul akibat dominasi asesmen sumatif, sementara praktik lain, seperti fokus berlebihan pada target kuantitatif dan peringkat, juga dapat memperkuat budaya kompetitif. Pengurangan praktik-praktik ini penting untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan reflektif. Selain itu, pemerintah dan pihak terkait sebaiknya menyederhanakan prosedur administrasi pada guru, seperti dokumentasi dan pelaporan. Pelatihan yang memadai juga perlu disediakan agar guru dapat menjalankan asesmen diagnostik-formatif, pembelajaran diferensiasi, dan proyek P5 tanpa tekanan birokratis yang tinggi. Di tingkat sekolah, dukungan manajerial harus diarahkan untuk memberi ruang refleksi, kolaborasi, dan inovasi pedagogis, sehingga tercipta lingkungan yang humanis dan dialogis. Lingkungan sekolah yang kolaboratif ini dapat meringankan beban administratif guru dan mengurangi budaya kompetitif. Dengan mengurangi persaingan berlebihan dan tekanan administratif, fleksibilitas kurikulum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan pembelajaran yang reflektif, humanis, dialogis, dan membebaskan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselesaikannya penelitian ini, baik melalui kontribusi pemikiran, referensi akademik, maupun bantuan teknis selama proses penyusunan naskah. Secara khusus, penghargaan disampaikan kepada Paulo Freire, yang gagasan-gagasannya mengenai pendidikan humanis, dialogis, dan kritis telah menjadi landasan penting dalam analisis dan pembahasan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada para peneliti dan institusi yang karya-karyanya menjadi rujukan utama dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, F., & Mustamid. (2024). Pelaksanaan Asesmen Formatif dan Sumatif Kurikulum Merdeka di SD N Ngasinan. *Journal of Primary Education Research*, 2(2), 164–171. <https://doi.org/10.57176/primer.v2i2.35>
- Anisa, D., Qodriyah, L., Windi Nurohmatul Azizah, & Muhammad Hufon. (2025). Menelaah Kurikulum Merdeka sebagai Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. *Chatra: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.62238/chatra.v3i1.185>
- Annasthasya, D., Alfindoria, I., Rahayu, S., & Khair, O. I. (2025). Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur Dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(7), 423–429. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1070>
- Ben Johnson, Dixon, S., & Edgar, A. (2024). The Transformative Potential of Critical Pedagogy for Education Studies Students in Interrogating Neoliberalism. *Journal for Critical Education Policy Studies*, 21(3). <http://www.jceps.com/archives/16138>
- Berutu, A. T., Khairunnisa, S., & Aspinda, L. (2023). Administrasi Kurikulum Dan Pembelajaran: Merdeka, Administrasi Kurikulum, Pembelajaran. *EDU MANAGE*, 2(2). <https://jurnal.staini.ac.id/index.php/edumanager/article/view/161>
- Chalaune, B. S. (2021). Paulo Freire's Critical Pedagogy in Educational Transformation. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 9(4), 185–194. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i4.2021.3813>
- Ćumura, L., & Petrović, V. (2022). Paulo Freire: From Critical Consciousness to The Pedagogy of The Oppressed. *KNOWLEDGE - International Journal*, 55(5), 959–964. <https://doi.org/10.35120/kij55059591>
- Dianti, K., Ulfah, M., Salam, A., Gunawan, G., & Luthfiah, L. (2025). Analisis Asesmen Diagnostik, Formatif dan Sumatif Serta Implikasinya terhadap Efektivitas Sistem Evaluasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(2), 555–565. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i2.1234>
- Dinn, W., Subkhan, E., Malik, A., Abdul Hakim, Moh., Sudiapermana, E., Alhapip, L., Anggraena, Y., Maisura, R., Amalia, N. R. A. S., Solihin, L., Ali, N. B. V., & Krisna, F. N. (2024). *Kajian Akademik Kurikulum Merdeka* (1st ed.). Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

- Riset, dan Teknologi.
https://kurikulum.kemdikbud.go.id/file/1711503412_manage_file.pdf
- Dong, M., & Liu, X. (2022). Impact of learners' perceptions of a high-stakes test on their learning motivation and learning time allotment: A study on the washback mechanism. *Heliyon*, 8(12), e11910. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11910>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Febrianningsih, R., & Ramadan, Z. H. (2023). Kesiapan Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3335–3344. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4686>
- Glenn Bowen. (2025). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Handayani, N., Normeiliani, P., Aslamiah, Pratiwi, D. A., Andini, S., & Zaliha. (2025). Beban Administratif dan Kurangnya Pelatihan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Pangeran 1. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 131–145. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.24286>
- Kautsar, M. B., Anafi, M. N., & Rachman, I. F. (2025). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Mengembangkan Critical Thinking Skills Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 2(4), 406–412. <https://doi.org/10.62017/jppi.v2i4.4566>
- KSPSTK. (2025, September 20). *Tantangan Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka* [Artikel]. KSPSTENDIK Kemdikbud | 2025. <https://kspstendik.kemdikbud.go.id/read-news/tantangan-dalam-penerapan-kurikulum-merdeka>
- Kuntuamas, A. D., Herlina, & Muchdar. (2025). Analisis Kesulitan Guru Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *JS (Jurnal Sekolah)*, 9(2), 313–325. <https://doi.org/10.24114/js.v9i2.64868>
- Lonescu, R. V., Zlati, M. L., Antohi, V. M., Cristache, N., & Raducan, M. (2022). Educational performance between the human resource's theoretical paradigm and the practical mentality. Analysis at the European level. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1038868>
- Longmuir, F., & McKay, A. (2024). Teachers workload strain: Considering the density as well as the quantity of teachers work. *Curriculum Perspectives*, 44(4), 561–565. <https://doi.org/10.1007/s41297-024-00279-2>
- Lubis, F. P., Siregar, N. B., Manurung, T. S., Mulyanti, A., Budianto, A., & Angin, L. M. P. (2025). Dampak Beban Administratif dalam Penilaian Autentik Kurikulum Merdeka terhadap Efektivitas Pengajaran Guru. *JGK (Jurnal Guru Kita)*, 9(3), 951–962. <https://doi.org/10.24114/jgk.v9i3.64652>
- Maut, W. O. A. (2022). Asesmen Diagnostik dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di SD Negeri 1 Tongkuno Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 2(4), 1305–1312. <https://doi.org/10.37905/dikmas.2.4.1305-1312.2022>
- Maylita, D. P. R. (2023). Tinjauan Kritis Kurikulum Merdeka: Perspektif Beragam dan Solusi Implementatif. *Indonesian Gender and Society Journal*, 4(2), 100–106. <https://doi.org/10.23887/igsj.v4i2.79880>
- OECD. (2025, October 6). *The demands of teaching: Results from TALIS 2024*. OECD. https://www.oecd.org/en/publications/results-from-talis-2024_90df6235-en/full-report/the-demands-of-teaching_0e941e2f.html
- Paulo Freire. (2025). *Pendidikan Kaum Tertindas* (Cetakan ke-9). Narasi.
- Rosyada, A., Syahada, P., & Chanifudin, C. (2024). Kurikulum Merdeka: Dampak Peningkatan Beban Administrasi Guru terhadap Efektivitas Pembelajaran. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(2), 238–244. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i2.491>
- Serani, G., & Hairida, H. (2024). Implementasi Asesmen Pembelajaran Kurikulum Merdeka: Kesulitan dan Tantangan Guru di Sekolah Dasar Kota Sintang. *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 15(1), 79–90. <https://doi.org/10.31932/ve.v15i1.3386>
- Shen, Z., Lan, R., Su, X., Lian, R., & Zhang, Y. (2025). The Relationship Between Extra-Administrative Workload, Emotional Exhaustion, and Work Engagement of Primary and Secondary

- School Teachers: Based on Multilevel Linear Model Analysis. *Behavioral Sciences*, 15(10), 1405. <https://doi.org/10.3390/bs15101405>
- Situmorang, A. (2021). Pendidikan “Kaum Tertindas” Paulo Freire—Suatu Tinjauan terhadap Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Kristen di Indonesia. *Jurnal Arrabona*, 3(2), 152–162. <https://doi.org/10.57058/juar.v3i2.42>
- Situmorang, S. T., Pandiangan, D. I. M., Simangunsong, S. F., Siboro, G. A. F. P., Marbun, V. M., Purba, E. N., Pandianga, M., & Sinaga, C. V. R. (2025). Refleksi Kritis Pendidikan Paulo Freire Terhadap Kurikulum Merdeka di Indonesia. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 2288–2302. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1523>
- Sobon, K., & Astari, T. (2024). Konsep Pendidikan Berbasis Masalah Paulo Freire dan Relevansinya dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila: Paulo Freire’s Problem-Based Education Concept and Its Relevance in the Project for Strengthening Pancasila Student Profiles. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(2), 266–275. <https://doi.org/10.23887/jfi.v7i2.71506>
- T. Hasballah & Zulfatmi. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka: Tantangan, Kebijakan, Dan Dampak Terhadap Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 10(2), 312–322. <https://doi.org/10.37567/jie.v10i2.3404>
- Wati, S. I., & Sugesti, I. (2025). Optimalisasi Student Centered Learning melalui Penerapan Project Based Learning berbasis Peta Konsep untuk Meningkatkan Keterlibatan dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *JURNAL JENDELA PENDIDIKAN*, 5(03), 479–485. <https://doi.org/10.57008/jjp.v5i03.1411>
- Yusa, I. M. M., Yusuf, M., Rahman, A., Aniati, & Supriyanto, D. (2023). The Challenges and Opportunities of Kurikulum Merdeka Implementation in Indonesia Schools. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 364–382.